

NOTA DINAS

NOMOR 11 /IJ-IND.2/KP/IV/2026

Yth. : Plt. Inspektur Jenderal
D a r i : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan I 2026 Inspektorat I
Tanggal : 6 April 2026

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian, bersama kami lampirkan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I tahun 2026.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Inspektorat I melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I pada Kinerja Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 48,18 % atau Rp 332.168.571,- dari anggaran total pagu Rp689.375.000,-.
2. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut;
 - Penyusunan Program Kerja dan SKP;
 - Layanan Konsultansi dan Pengawasan di Wisma Industri;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BDI Padang;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BDI Medan;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada PTKI Medan;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik AKA Bogor;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik STTT Bandung;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik Petrokimia Banten;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik APP Jakarta;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik SMTI Jakarta;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BDI Jakarta;
 - Melaksanakn Pra dan Penilaian Evaluasi SAKIP;

- Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
 - Penyusunan LAKIP Inspektorat I;
 - Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Target PNBPN dan Pagu Penggunaan PNBPN serta Penyelesaian Tunggalan Belanja pada BPSDMI;
 - Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Operasional Kementerian Perindustrian dan Belanja Modal Satuan Kerja pada BPSDMI;
 - Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal.
3. Seluruh kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada kendala secara signifikan.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal Lebih lanjut disampaikan terima kasih.

Inspektur I, 

Dewi Setiawati

Tembusan:

Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**

REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I**

TAHUN 2026

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, April 2026

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN I
TAHUN 2026**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan I Tahun 2026.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan atau melaksanakan pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, Maret 2026

Inspektur I

Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2025	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	12
A. Capaian Kinerja TW I TA 2025	12
B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	14
C. Analisis Capaian Kinerja	17
D. Hambatan dan Kendala	21
E. Tindak Lanjut	22
BAB IV : PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,

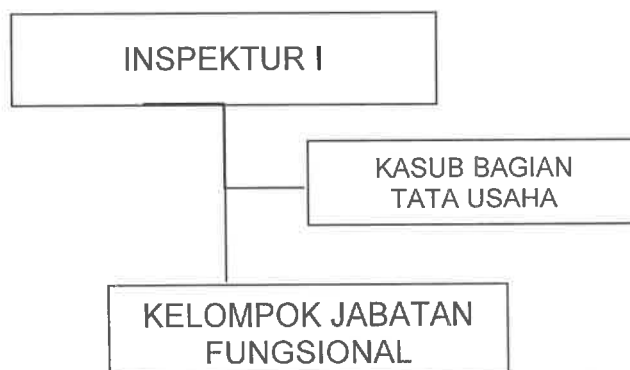
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 17 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 4 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pertama : 6 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan
2.	Layanan Manajemen Keuangan	1 Laporan
3.	Layanan Audit Internal	31 Laporan
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Laporan
5.	Layanan Manajemen Kinerja	1 Laporan
6.	Layanan Reviu	38 Laporan
7.	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	39 Laporan
8.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	12 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 689.375.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2026

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
1841	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		124	Laporan	
1841.EBD.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	689.375.000			
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.200.000	1	Lap	1. (satu) Laporan pp39
1841.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.280.000	1	Lap	2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Program/Kegiatan Lainnya Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I
1841.EBD.965	Layanan Audit Internal	416.948.000	31	Lap	3. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester I pada 31 (tiga puluh satu) Satker
1841.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.600.000	1	Lap	4. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan
1841.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja	15.850.000	1	Lap	1. Dokumen LAKIP Inspektorat I
1841.EBD.981	Layanan Reviu	4.623.000	38	Lap	1. 38 (Tiga puluh delapan) LHR Semester I pada 38 (tiga puluh delapan) Satker
1841.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	133.325.000	39	Lap	1. 39 (tiga puluh sembilan) LHE SAKIP pada 38 unit kerja vertical dan 1 (satu) pusat
1841.EBD.983	Layanan Konsultasi dan Pengawalan	108.549.000	12	Lap	1. 12 (dua belas) Laporan Bulanan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat I

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,45	Indeks
		2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I	62	Indeks
		3	Nilai SAKIP Inspektorat I	79,45	Indeks
		4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I	63	Indeks
		5	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91,3	Indeks

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2026

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA				TARGET						
						TW I	TW II	TW III	TW IV							
Sasaran Kegiatan																
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,45%	Terselenggaranya Audit Kinerja pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Audit Kinerja pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%	25%					
				Terselenggaranya Reviu pada Satuan Kerja BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Reviu pada Satuan Kerja BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%	25%					
				Terselenggaranya penilaian SAKIP unit kerja pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penilaian SAKIP unit kerja pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%	25%					
				Terselenggaranya pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%	25%					
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	62	Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kinerja pada BPSPDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penyusunan Rencan Aksi Tindak Lanjut yang Sistematis	25%	25%	25%	25%	25%					
		Nilai SAKIP	79,45	Meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Prosentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Prosentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91,3%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	Prosentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I melalui akun 524111,524113,521211,521211,521811	25%	25%	25%	25%	25%	25%				

RENCANA KERJA TRIWULAN I

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				1841	Resiko utama	Anggaran	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan Tenwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kementerian perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja tugas cakupan tugas Inspektorat I	-	-	-	0,45%	1. Pelaksanaan audit kinerja		416.948.000	25%	25%	25%	25%
						2. Reviu LK/ BMN		4.623.000	25%	25%	25%	25%
						3. Reviu PIPK		-	25%	25%	25%	25%
						4. Reviu RKA-K/L		-	25%	25%	25%	25%
						5. Reviu RK-BMN		-	25%	25%	25%	25%
						6. Manjemen resiko		-	25%	25%	25%	25%
						7. Evaluasi saking		133.325.000	25%	25%	25%	25%
						8. Layanan Konsultasi dan Pengawalan cakupan Tugas Inspektorat I		108.549.000	25%	25%	25%	25%
						9. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I		23.140.000	25%	25%	25%	25%
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya												

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2026. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Audit Internal
 - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - b. Reviu
 - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu PIPK pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - c. Monitoring
 - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan I TA 2026

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2026 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat I yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). pada triwulan ini belum dapat dihitung dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK.
- 2) Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I;
Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dalam 90 (sembilan puluh) hari dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Surat Pernyataan Kesanggupan Menindaklanjuti	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1	BDI Padanf	Ada	Ada
2	BDI Medan	Ada	Ada
3	PTKI Medan	Ada	Ada
4	Politeknik AKA Bogor	Ada	Ada
5	Politeknik STTT Bandung	Ada	Ada
6	Politeknik Petrokimia Banten	Ada	Ada
7	Politeknik APP Jakarta	Ada	Ada
8	Politeknik SMTI Jakarta	Ada	Ada
9	BDI jakarta	Ada	Ada

*) Satker yang telah membuat kedua dokumen diatas maka dapat dinyatakan telah berupaya melaksanakan tindak lanjut yang dinyatakan dalam IKU dengan status Belum Sesuai Rekomendasi.

Secara perhitungan indikator pada Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan masih dalam proses audit dan satuan kerja

masih dalam tahap konfirmasi dengan Tim Audit, perhitungan dapat dilakukan pada awal Triwulan III.

3) Nilai SAKIP

Memperbaiki, Meningkatkan dan Mengoptimalkan rencana aksi kinerja agar digunakan sebagai dasar evaluasi dengan analisis mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi, memastikan semua dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.

4) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga dalam mengelola arsip sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip berjalan efektif dan efisien pada Inspektorat I

5) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 40 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

Secara perhitungan indikator pada Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan,

namun secara parsial dapat dikatakan capaian PDN pada Triwulan I adalah 28,39% sesuai dengan realisasi anggaran per 31 Maret 2025.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 48,18% atau sebesar Rp332,168,571,- dari total pagu Rp, 689.375..000.-

Hasil ini telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan sehingga pelaksanaan kegiatan di triwulan II tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK.	689.375..000	45,46	332.168.571	48,18	45,46	332.168.571	44,37	44,54	357.206.429	51,92

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Layanan Manajemen Keuangan	2.400.000	100	2.400.000	100	100	2.400.00	100	100	0	100
2 Layanan Audit Internal	575.477.000	52	299.807.604	52	52	299.477.000.-	48	48	275.669.398	48
3 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.0001	0
4 Layanan Manajemen Kinerja	15.720.000	2	200.000	2	2	200.000	2	98	15.520.000	98
5 Layanan Reviu	9.394.000	80	7.600.000	80	80	7.600.000	80	80	1.794.000	20
Layanan Monitoring dan Evaluasi	16.000.000	62	10.000.000	62	62	10.000.000	62	62	6.000.000	38
Layanan Konsultasi dan Pengawasan	68.984.000	18	12.160.967	18	18	12.160.967	18	18	56.823.033	82
Total	689.375.000	48,18	332.168.571	48,18	36,40	332.168.571	35,91	63,60	357.206.429	52

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (Jakarta - Maret 2026) adalah

1. Penugasan kegiatan Inspektorat I pada satuan kerja di BPSDMI;
 - a) Layanan Konsultansi dan Pengawasan di Wisma Industri tanggal 22 Januari 2026;
 - b) Penyusunan Program Kerja dan SKP;
 - c) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I;
 - d) Telah dilaksanakan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - e) Rapat Evaluasi Kegiatan Pengawasan TA 2024 dan Rencana Pengawasan 2026.
 - f) Audit BDI Padang
 - g) Audit BDI Medan
 - h) Audit PTKI Medan
 - i) Politeknik STTT Bandung;
 - j) Politeknik AKA Bogor;
 - k) Politeknik STMI Jakarta;
 - l) Politeknik APP Jakarta;
 - m) Balai Diklat Industri Jakarta (BDI Jakarta);
 - n) Politeknik Petrokimia Banten.
 - o) Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Target PNBPN dan Pagu Penggunaan PNBPN serta Penyelesaian Tunggakan Belanja pada BPSDMI
 - p) Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Operasional Kementerian Perindustrian dan Belanja Modal Satuan Kerja pada BPSDMI

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 48,18% atau sebesar Rp332,168,571,- dari total pagu Rp, 689.375.000.-

Hasil ini telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan sehingga pelaksanaan kegiatan di triwulan II tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2026 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2026

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	0,45%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	reviu revisi anggaran BPSDMI	Ir I, II, III, IV, Set Ijen
							Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	- Mengumpulkan data hasil audit internal tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai tindak lanjutnya. - Koordinasi Melakukan monitoring terhadap progres tindak lanjut rekomendasi oleh unit Inspektorat I.	62%	- Memverifikasi penyelesaian rekomendasi: status selesai, belum selesai, atau tidak dapat ditindaklanjuti. - Menyusun laporan berkala (bulanan/triwulanan) terkait pencapaian penyelesaian.		Ir I, II, III, IV, Set Ijtn	Koordinator TL dan EHP
		Nilai SAKIP	- Menelaah keseluruhan antara RPJMN/RPJMD, Renstra, Renja, hingga cascading ke level individu (SKP). - Melakukan review atas indikator kinerja utama (IKU)	79.5	Menyelenggarakan pelatihan, bintek penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja Inspektorat I	Memberikan rekomendasi untuk perbaikan target atau realisasi bila ditemukan ketidaksesuaian.	Ir I, II, III, IV, Set Ijtn	Auditor

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	- Melakukan klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif, dan inaktif, dan permanen sesuai tata naskah dinas. - Menyusun daftar arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.	61%	Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelayanan publik.		Ir I, II, III, IV, Set Itjen	

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Sesuai dengan tata cara penghitungan pada triwulan I sebesar 359,133,082 dengan sisa	Ir I, II, III, IV, Set Ijen	Kepala Bagian Umum

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,45	Belum dapat dihitung
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	62	Belum dapat dihitung
		3	Nilai SAKIP	79,45	Belum dapat dihitung
		4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	Belum dapat dihitung
		5	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91,3	Belum dapat dihitung

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Terdapat penugasan di luar pelaksanaan PKPT yang mengakibatkan berkurangnya tenaga auditor untuk menyelesaikan rencana PKPT sehingga pelaksanaannya sering mundur dari jadwal sebelumnya namun tidak berdampak pada pelaksanaan PKPT;
3. Anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi kegiatan pendukung sasaran kinerja sehingga hanya bersifat mandatory dan prioritas kegiatan berisiko;

E. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan I untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.;
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis ssstem informasi di Inspektorat Jenderal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada TW I telah tercapai;
2. Realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 48,28% atau Rp332.168.571,- dari total pagu sebesar Rp.689.375.000,-;
3. Dengan anggaran yang tersedia saat ini, rencana kegiatan pengawasan pada TW II Inspektorat I sangat sulit agar terlaksana sesuai rencana aksi.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – I
TAHUN ANGGARAN 2026 INSPEKTORAT I